

## Departemen Tenaga Kerja A.S.

### Temuan 2021 atas Bentuk Tenaga kerja anak Terburuk

#### Indonesia

Pada 2021, Indonesia membuat kemajuan yang moderat dalam upaya menghilangkan bentuk terburuk dari tenaga kerja anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meluncurkan sebuah hotline untuk berhubungan dengan tenaga kerja anak atau penyintas perdagangan anak yang membutuhkan penjangkauan, manajemen kasus, shelter atau perlindungan, mediasi, dan layanan korban. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang mewajibkan pemerintah pusat dan regional menyediakan perlindungan menyeluruh untuk anak yang adalah penyintas dari bentuk tenaga kerja anak paling buruk, serta juga anak dari kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja mempekerjakan 1503 inspektur tenaga kerja pada 2021, naik dari 1352 inspektur tenaga kerja pada 2020. Tetapi, anak-anak di Indonesia menghadapi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk eksploitasi seksual komersial, kadang-kadang sebagai akibat perdagangan manusia. Anak-anak juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya di pertanian perkebunan, termasuk produksi minyak kelapa sawit dan tembakau. Kementerian Tenaga Kerja masih kekurangan sumber daya finansial dan personil yang perlu untuk sepenuhnya menegakkan hukum tenaga kerja anak di seluruh negara.

Tindakan Pemerintah Yang Disarankan untuk Menghilangkan Tenaga kerja anak		
Bidang	Tindakan Yang Disarankan	Tahun-Tahun Yang Disarankan
Kerangka Kerja Hukum	Memastikan ancaman, penggunaan kekuatan, atau pemaksaan tidak terbentuk untuk kejahatan perdagangan anak.	2018 – 2021
	Memastikan pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak adalah menyeluruh dan termasuk sektor-sektor di mana tenaga kerja anak diketahui terjadi, termasuk joki untuk balapan kuda.	2019 – 2021
	Memastikan hukum peraturan kerja ringan memerinci kegiatan di mana pekerjaan ringan diizinkan.	2020 – 2021
	Menyusun hukum pendidikan publik dasar bebas pungutan dengan mencabut peraturan yang mengizinkan sekolah memungut biaya.	2020 – 2021
Penegakan	Memastikan pendanaan inspektorat tenaga kerja cukup untuk mencakup infrastruktur, transportasi, dan kebutuhan bahan bakar sehingga memberdayakan para inspektur tenaga kerja melaksanakan inspeksi.	2018 – 2021

<b>Tindakan Pemerintah Yang Disarankan untuk Menghilangkan Tenaga kerja anak</b>		
<b>Bidang</b>	<b>Tindakan Yang Disarankan</b>	<b>Tahun-Tahun Yang Disarankan</b>
	Penambahan secara signifikan jumlah inspektur tenaga kerja guna memenuhi saran teknis ILO yang menyediakan perlindungan cukup untuk tenaga kerja.	2010 – 2021
	Memastikan para inspektur tenaga kerja melakukan pemeriksaan pelanggaran tenaga kerja anak di semua tempat pekerjaan yang relevan, termasuk sektor informal.	2018 – 2021
	Memastikan semua personil penegak hukum tenaga kerja dan kejahatan menerima pelatihan cukup untuk regulasi tenaga kerja anak, termasuk pelatihan penyegaran.	2017 – 2021
	Mengumpulkan dan menerbitkan data penegakan kejahatan nasional tentang jumlah pelanggaran tenaga kerja anak, termasuk bentuk terburuk dari tenaga kerja anak.	2021
	Menerbitkan informasi penegakan hukum kejahatan, termasuk jumlah pelanggaran yang ditemukan, penuntutan yang diprakarsai untuk kejahatan terkait dengan tenaga kerja anak, termasuk bentuk-bentuknya yang terburuk.	2009 – 2021
Koordinasi	Mendanai secara cukup Gugus Tugas Provinsi dan Distrik dan mewajibkan mereka mengikut-sertakan kebijakan dan saran anti perdagangan manusia nasional ke dalam prioritas kebijakan mereka sehubungan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.	2016 – 2021
Program Sosial	Melakukan penelitian untuk menetapkan jenis kegiatan kerja yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk sektor pekerjaan konstruksi dan jalan, guna memberi masukan untuk kebijakan dan program sosial.	2014 – 2021
	Mengumpulkan dan menerbitkan data prevalensi tentang tenaga kerja anak usia 5 sampai 10 tahun.	2019 – 2021
	Meningkatkan usaha untuk menghilangkan perintang ke pendidikan, termasuk memastikan agar semua anak bisa memperoleh nomor identifikasi siswa yang diterbitkan pemerintah sehingga mereka bisa bersekolah.	2016 – 2021